

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Implementasi perspektif PUG dalam belanja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Dinas P3AP2KB Kota Padang belum sepenuhnya memadai untuk mendorong potensi dan dampak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Pernyataan ini disimpulkan sebagaimana temuan dan analisis data yang diuraikan berlandaskan pada kerangka fungsional dari Elson.

Pertama, belanja kategori pelembagaan kesetaraan gender pada Program PUG dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Pada variabel masukan, anggaran mengakomodasi telah mengakomodasi pelaksanaan kegiatan meskipun belum dikelola secara strategis. Pada variabel kegiatan, pelaksanaan PUG dan PPRG belum memadai dan masih parsial: PUG dan PPRG (fokus dalam menyelaraskan kapasitas aransemen implementasi pada tim driver, *focal point* dan analisis gender); sistem data gender dan anak (fokus penyediaan bukan pemanfaatan). Akibat belum memadainya pelaksanaan kegiatan membawa fluktuasi keluaran dan dampak terutama hubungan simbiosis yang mempengaruhi agar kegiatan pada program kategori umum atau spesifik dapat berkontribusi mengurangi kesenjangan gender.

Kedua, belanja dalam kategori umum pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan kategori spesifik pada Program Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus

Anak. Program-program ini pada hakikatnya memiliki potensi dan dampak dalam mewujudkan kesetaraan gender secara substantif namun belum diterjemahkan secara strategis. Aspek masukan anggaran dan pelaksanaan kegiatan teridentifikasi belum berjalan maksimal pada Program Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak (PHA). Terdapat *gap* (perbedaan) antara bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan dalam Program Pemberdayaan Perempuan yang telah direncanakan dengan yang dilaksanakan.

Dalam Program Pemberdayaan Perempuan, arah pelaksanaan kegiatan menandai bentuk penghargaan atas peran gender perempuan yang cenderung simbolis, reproduktif dan ekspresif. Adapun, dalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga, konsentrasi anggaran mengarah pada agenda perlombaan menjadikan pembinaan dan pelatihan menjadi kurang merata dan terbatas untuk dapat berfokus pada hal-hal yang lebih prioritas.

Secara umum, pada akhirnya, penerapan PPRG dan juga capaian ARG dipengaruhi oleh aktor-aktor dan proses-proses dalam manajemen keuangan daerah. Adapun potensi, arah dan dampak untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam implementasi ditentukan oleh strategi, jenis atau bentuk kegiatan serta ketersediaan dan mobilisasi sumber daya anggaran, manusia dan material yang memadai. Dan, dalam rangka mendorong dan mewujudkan kesetaraan gender tidak ada pendekatan “*one size fits all*”. Karena itu, fondasi dasar perlu memperkuat analisis isi (*content*) program atau kegiatan dan kondisi kelompok sasaran yang memungkinkan kesetaraan gender dapat diterjemahkan dengan target dan indikator yang jelas dan spesifik.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan penelitian Implementasi Perspektif PUG dalam Belanja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas P3AP2KB Kota Padang, dapat dituliskan saran sebagai berikut.

- a. Dinas P3AP2KB perlu mempertimbangkan pembentukan Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP) tersendiri yang dapat fokus terhadap PUG.
- b. Dalam upaya mengoptimalkan PPRG dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau LSM. Dinas juga dapat menghadirkan inovasi berbentuk *website* untuk diseminasi informasi serta pelaporan GAP dan GBS OPD. Pelibatan lebih banyak personel OPD dan penambahan sesi sosialisasi dan pelatihan dapat menjadi pilihan apabila dimungkinkan.
- c. Dalam pengelolaan sistem data gender dan anak, Dinas perlu memberi perhatian pada pemanfaatan basis data gender dan anak untuk dirumuskan strategi intervensi secara sektoral maupun kolaborasi lintas sektor.
- d. Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Dinas perlu mengupayakan agar UPTD PPA segera terbentuk karena memiliki struktur dan cakupan lebih ideal dibandingkan P2TP2A dalam rangka fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang maksimal.
- e. Rencana dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan dalam rangka *service delivery* perlu meninjau dan mempertimbangkan arah *outcome* (hasil) yang hendak dicapai sehingga dapat membawa daya manfaat yang lebih strategis termasuk dalam mendorong kesetaraan gender.